



Potensi Kerugian & tidak Optimalnya Aset di PT. HIN, Setneg dan Pemprov DKI

Fitra

(Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran)

Jakarta, 20 Januari 2015

Informasi Umum PT. HIN

PT. HIN merupakan perubahan nama dari PT. (Persero) Hotel Indonesia Internasional (PT. HII) setelah bergabungnya PT. Natour Hotel dan Tourism (PT. Natour) ke dalam PT HIN.

Penggabungan berdasarkan peraturan pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas serta peraturan pemerintah No. 89 tahun 1999 tentang penggabungan perusahaan perseroan PT. Natour ke dalam perusahaan perseroan PT. Hotel Indonesia Internasional, dengan penyertaan modal Nomor. Kep-31/MBU/2005 Rp. 16.700.000.000.

Pertimbangan Kerja Sama	Latar belakang program pengembangan PT HIN
<ol style="list-style-type: none">1. Sumber dana internal terbatas.2. Tidak ada penambahan PMP3. HIN belum “<i>bankable</i>”4. Bunga bank relatif tinggi fluktuatif.5. HIN belum layak untuk untuk IPO saham atau penerbitan obligasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Usia unit hotel HIN diatas 30 tahun Belum pernah dirnovasi total2. Biaya perawatan tinggi3. Daya saing semakin rendah4. Tarif rata-rata rendah5. Laba rendah dan tidak optimal6. Diproyeksikan laba mendatang akan semakin menurun

Dasar hukum Pengembangan PT. HIN

1. Surat menteri Negara BUMN No.s-98/m-bumn/2001/tgl 15 september 2001
2. Peraturan menteri BUMN nomer: per-13/mbu/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset BUMN
3. Surat menteri Negara BUMN Nomer. 136 /MBU/2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang persetujuan Pengembangan Kerjasama Hotel Indonesia dan INNA Wisata dengan PT. CKBI.
4. Akta Notaris: Irwan Soerojo, SH, M.Si (Akta Perjanjian Pembangunan, pemilikan, pengelolaan, peyerahan kembali tanah, gedung, dan fasilitas penunjang)

Jumlah Laba-Rugi PT. HIN

Keterangan	2014	2013
Pendapatan usaha	Rp 349.208.844.155	Rp 360.730.598.158
Harga pokok dan beban langsung	Rp132.519.794.554	Rp 119.859.969.759
Laba kotor	Rp 216.689.049.061	Rp 186.872.628.399
Beban usaha	Rp264.201.359.111	RP 253.368.454.801
Laba-rugi usaha	(Rp 47.512.309.510)	Rp 66.495.826.402
Pendapatan keuangan	191.270.518.455	Rp 52.971.783.009
Biaya keuangan	(Rp 41.782.845.153)	Rp29.344.691.521
Laba-rugi sebelum pajak penghasilan	Rp 101.975.363.792	Rp 42.868.734.914
Beban pajak penghasilan	Rp 878.562.704	Rp3.547.652.021
Laba-rugi bersih tahun berjalan	Rp 102.853.926.496	Rp 46.416.386.935

Temuan BPK pada PT. HIN

A. Perjanjian Build, Operate, dan transfer (BOT) antara PT. Hotel Indonesia Natour (PT. HIN) dengan PT Cipta Karya Bumi Indah (PT. CKBI) dan PT. Grand Indonesia (PT. GI) tidak sesuai proses perencanaan.

- Perjanjian tidak sesuai dengan dokumen pengembang dan surat persetujuan dari menteri BUMN No. S-136/MBU/2004. Dalam dokumen pengembangan tidak seluruhnya dicantumkan dalam pasal-pasal perjanjian BOT dan lebih cenderung menguntungkan pihak penerima BOT. Kerjasama melebihi 30 tahun, karena ditambah 20 tahun.
- Permasalahan yang terjadi mengakibatkan peran dari PT. CKBI yang terpilih sebagai mitra melepas tanggung jawab setelah kontrak kerja sama ditandatangani dan PT. HIN berpotensi dirugikan akibat pelaksanaan BOT yang tidak sesuai perencanaan awal, seperti kompensasi tidak sesuai persentase.

Kompensasi selama periode BOT

Periode	Nilai Kompensasi	Total
2004-2015	Rp. 10 M/ Tahun	= Rp. 120 M
2016-2020	Rp. 11 M/ Tahun	= Rp. 55 M
2021-2025	Rp. 12 M/ Tahun	= Rp. 60 M
2026-2030	Rp. 13 M/ Tahun	= Rp. 65 M
2031-2035	Rp. 14 M/ Tahun	= Rp. 70 M
2036	Rp. 15 M/ Tahun	= Rp. 15 M
Total Kompensasi Tahunan		= Rp. 385 M

B. PT. HIN kehilangan kesempatan untuk memperoleh nilai kompensasi yang lebih besar dari perpanjangan hak opsi (Rp. 1,2 Triliun)

- Tambahan gedung perkantoran dan apartement diatas objek BOT yang secara tidak jelas terdefinisi dalam perjanjian BOT belum diperhitungkan.
- Pengajuan hak opsi perpanjangan perjanjian BOT belum mempertimbangkan umur ekonomis bangunan. Diketahui umur ekonomis bangunan pusat perbelanjaan/mall adalah 40 tahun, seakan bangunan kantor dan hotel 5 lantai adalah 50 tahun. Sehingga setelah diserahkan kembali kepda PT HIN tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Penambahan 2 fasilitas: Menara BCA dan Apartement

No	Perjanjian BOT: gedung dan fasilitas penunjang yang wajib dibangun	Hasil pengamatan fisik
1	Hotel bintang 5 seluas ± 42.815 m ²	Hotel Indonesia
2	Pusat perbelanjaan I seluas ± 80.000 m ²	Pusat perbelanjaan I
3	Pusat perbelanjaan II seluas ± 90.000 m ²	Pusat perbelanjaan II
4	Fasilitas parkir seluas ± 175.000 m ²	Fasilitas parkir
5	-	Gedung perkantoran (menara BCA)
6	-	Apartement

C. Target pendapatan usaha PT. HIN tahun 2013 dan 2014 tidak tercapai

- Permasalahan tersebut diakibatkan oleh: 1. Pencapaian realisasi pendapatan PT HIN dengan anggaran sebelumnya mengalami penurunan
- Kinerja riil dinilai buruk. Karena tidak dapat mencapai target yang dianggarkan bahkan cenderung menurun.
- Hal tersebut disebabkan oleh: 1. RKAP yang disusun tidak aktif terhadap kondisi PT HIN yang sebenarnya. 2. PT HIN menetapkan RKAP lebih tinggi dari trend perkembangan bisnisnya.

PT. HIN melaporkan laba rugi dan RKAP

Uraian	2012			2013			2014		
	RKAP	Relisasi	% dari RKAP	RKAP	Relisasi	% dari RKAP	RKAP	Relisasi	% dari RKAP
Pendapatan Usaha (Kamar, makan, minum)	358.873	264.842	74%	427.413	206.730	72%	553.945	349.209	63%
Beban Pokok dan langsung (Kamar, makan, minum)	123.444	105.939	86%	142.022	119.858	84%	179.145	132.520	74%
Beban Usaha (Adminitrasi, Umum, Pemasaran, Publikasi)	214.279	178.958	84%	244.539	253.368	104%	310.642	264.201	85%
Jumlah									
Laba/(Rugi) usaha	21.150	-20.055	-95	40.852	-166.496	-163	64.158	-47.512	-74

D. Penyetoran pajak pembangunan I (Pajak Daerah) pada Unit Inna Simpang dan Head Quarter tertunggak minimal sebesar Rp 4.107.598.357.

- Tunggakan pajak pembangunan I (pajak daerah) Unit Inna Simpang dari tahun 2006-2015 sebesar Rp. 3.288.465.084 dan Unit Head Quartes (Kuta) dari tahun 2013-2015 sebesar Rp. 819.122.181.
- Permasalahan tersebut mengakibatkan PT HIN (Simpang dan Head Quarter) menanggung beban pajak sebesar Rp. 4,1 Miliar yang berpotensi semakin membesar karena bunga dan denda terlambat.
- PT. HIN berpotensi mendapatkan surat paksa dari pemerintah kota surabaya, PT. HIN *Head Quarter* beresiko dikenakan ketentuan pidana tentang pajak. Pendapatan pajak daerah khususnya surabaya dan kabupaten badung tertunda.

E. Aset PT HIN belum dimanfaatkan secara optimal

- PT HIN terdiri dari 16 hotel dan 2 catering. Usaha-usaha tersebut memiliki aset lain berupa tanah, prasarana, dan bangunan.
- Permasalahan diatas mengakibatkan PT HIN semakin terbebani dengan biaya pemeliharaan, pengamanan atas hak pemilikan tanah. Potensi hilang dan rusaknya aset PT. HIN karena dikuasai pihak lain.

Daftar Aset Tetap	2012	2013	2014
Tanah	1.560.873.971	6.502.227.586	6.245.532.025
Prasarana	257.338.518	13.818.222.815	14.260.808.162
Bangunan	193.139.917.093	382.346.456.455	384.745.672.052
Investas dan perlengkapan	65.508.492.240	134.056.276.984	141.726.407.973
Mesin, kendaraan, dan instalasi	104.571.561.072	170.294.141.577	182.782.097.827
Aset tetap dalam rangka bangun, kelolah dan alih	971.493.000	971.493.000	971.493.000
Jumlah	366.009.675.894	707.988.818.417	730.732.011.039

Informasi Umum Aset Setneg

Data Tahun 2010 RDP DPR

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno

Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Ibnu Purna dan Direktur Utama PPKGBK Bambang Prajitno menjelaskan bahwa Kawasan Komplek Gelora Bung Karno merupakan Hak Pengelolaan (HPL) dengan 5 (lima) sertifikat yang luas keseluruhannya adalah 2.790.835 m² atau 279,08 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|---|----------|-----------------------------|
| 1. Sertifikat HPL No. 1/Gelora seluas | | : 2.664.210 m ² |
| 2. Sertifikat HPL No. 1/Grogol Utara | seluas | : 30.100 m ² |
| 3. Sertifikat HPL No. 1/Grogol Selatan | seluas : | 14.555 m ² |
| 4. Sertifikat HPL No. 2/Grogol Utara | seluas | : 43.035 m ² |
| 5. Sertifikat HPL No. 2/Grogol Selatan seluas | : | <u>38.935 m²</u> |
| Total | | : 2.790.835 m ² |

HPL tersebut di atas dimanfaatkan untuk olah raga dan sarana pendukungnya (termasuk BOT PT.SKIG, PT AA, PT.ASP) seluas 148, 18 Ha (53,10%) terdiri dari: Stadion Utama, Gedung-gedung olah raga (Hall Basket, Hall A, B, C, D, Hall Volley dan Hall Bulutangkis), Istora, Stadion Tennis dan Hall Senam, Stadion Renang dan Kridaloka, Stadion Madya, Lapangan Menembak, Lapangan Panahan, Lapangan Hockey, Lapangan Sepak Bola A,B,C,D,E, Sirkuit Radio Control, Lapangan Soft Ball dan Base Ball, Gedung Serbaguna dan Masjid Al-Bina, Taman Parkir Timur, Taman Persahabatan, Taman Jalur Utara, Taman Pembibitan DKI Jakarta, Plaza Stadion Utama (Plaza Utara, Plaza Timur, Plaza Selatan, Plaza Tenggara, dan Jalur Sepatu Roda), Jalur jalan dan irigasi, Hutan Kota, Lapangan Golf (kerja sama BOT dengan PT.SKIG), Golf Driving Range (kerja sama BOT dengan PT.Adil Andaru), dan Gedung Serbaguna Olah Raga (kerja sama BOT dengan PT. Achipelago Sapta Pesona).

- Selanjutnya lahan seluas 604.087 m² (60,41 Ha) dengan status HPL yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemprov. DKI Jakarta terdiri dari: Kementerian Kehutanan seluas 100.023 m², Komplek MPR, DPR/DPD RI seluas 26.915 m², Kementerian Pendidikan Nasional seluas 40.345 m², LPP TVR RI – Hak Pakai seluas 46.791 m², Pemprov. DKI Jakarta (Kantor Kelurahan Gelora) – Hak Pakai seluas 1.611 m², dan Pemprov. DKI Jakarta (SMU 24 dan Puskesmas) – Hak Pakai seluas 3.399 m².
- Sedangkan lahan yang dikerjasamakan dengan mitra usaha seluas 70,49 Ha dengan rincian sebagai berikut:

BOT Tanah GBK

N0.	Mitra Usaha	Luas Lahan (Ha)	Status Tanah
1.	PT. Aneka Bina Lestari	1,15 Ha	HPL
2.	PT. Graha Sidang Pratama	6,22 Ha	HPL
3.	PT. Mulia Intan Lestari	4,00 Ha	HPL
4.	PT. Mandiri Karya Indah Sejahtera	0,54 Ha	HPL
5.	PT. Ariobimo Laguna Perkasa	10,05 Ha	HPL
6.	PT. Marlin Citra Mandiri	0,21 Ha	HPL
7.	PT. Selaras Nusa Perkasa	2,17 Ha	HPL
8.	PT. Interland Citra Mandiri	1,20 Ha	HPL
9.	PT. Manggala Gelora Perkasa (Senayan City)	4,00 Ha	HGB di atas HPL
10.	PT. Kajima Overseas Asia Pte.Ltd (PT. Senayan Tri Karya Sempana)	20,00 Ha	HGB di atas HPL
Total		49,53 Ha	

2. Kerja Sama Operasi

No.	Mitra Usaha	Luas Tanah (Ha)	Status Tanah
1.	PT. Lingga Hamparan Krida	1,84 Ha	HPL
2.	PT. Mitra Indotama Karsajaya	1,00 Ha	HPL
Total		2,84 Ha	

3. Pemberian Rekomendasi HGB di atas HPL

No.	Mitra Usaha	Luas Lahan	Status Tanah
1.	PT. Terminal Builders	1,06 Ha	HGB di atas HPL
2.	PT. Amana Jaya	0,62 Ha	HGB di atas HPL
3.	PT. Ratu Sayang Internasional	1,72 Ha	HGB di atas HPL
4.	PT. Indobuildco (Hotel Sultan)	13,73 Ha	HGB di atas HPL
Total		17,13 Ha	

4. Sewa Menyewa Lahan untuk Jalan

No.	Mitra Usaha	Luas Lahan	Status Tanah
1.	PT. Indobuildco	0,99 Ha	HPL
Total		0,99 Ha	

Potensi Kerugian Dan Kehilangan Aset GBK

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebagian dari HGB yang terbit sebelum HPL No. 1/Gelora, menjadi obyek perkara di Pengadilan, yaitu:

- 1. HGB No. 26 dan No. 27/Gelora atas nama PT. Indobuildco, berkedudukan di Jakarta, menjadai obyek gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pada Tingkat Kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung RI.
- 2. HGB No. 410/Gelora atas nama PT. Terminal Builders, berkedudukan di Jakarta seluas 10.569 m² menjadi obyek gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara No. 256/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Maret 2010.
- 3. HGB No. 411/Gelora atas nama PT. Amana Jaya yang berkedudukan di Jakarta. Seluas 6.207 m² menjadi obyek gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara No. 257/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Maret 2010.
- Sesuai Surat Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 12 Agustus 2010 Nomor: DA.00/5922/DPR RI/VIII/2010, sebagian dari tanah HPL No. 1/Gelora seluas 385.003 m², yang penggunaannya sebagai Komplek DPR RI/MPR RI/DPD RI, saat ini sedang dimohon pengukuran pada Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, yang belum dipenuhi oleh Sekjen DPR RI sebagai PNPB sebesar Rp 24.010.078,- berdasarkan PP No. 13/2010 (sesuai SPS No. 12078/2010 tanggal 24 September 2010).

Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran

- Tanah eks Pelabuhan Udara Kemayoran itu berstatus HPL yang dikuasai oleh Sekretariat Negara cq. Badan Pengelola Komplek Kemayoran yang sekarang berubah menjadi Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. Keseluruhan luas tanah adalah **418,0115 Ha** yang terdiri dari:
 - 1. HPL No. 1/Pademangan Timur seluas : 182,3530 Ha.
 - 2. HPL No.1/Gunung Sahari Utara seluas : 102,0990 Ha
 - 3. HPL No. 1/Gunung Sahari Selatan seluas : 94,5315 Ha
 - 4. HPL No. 1/Kebon Kosong seluas : 39,0280 Ha
 - Total seluas : 418,0115 Ha

Tata Kelola Saat ini diduga BOT dengan Swasta

- Sesmensesneg mengatakan bahwa sesuai dengan hasil Inventarisasi dan Revaluasi terhadap lahan itu yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-252/MK.6/2008 tanggal 22 Desember 2008, total nilai aset yang terdapat di 4 (empat) blok, yaitu Blok A, Blok B, Blok C, dan Blok D seluas 428,0356 Ha adalah Rp 24.193.088.741.309,40,- dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Blok A seluas 46,4579 Ha dengan nilai Rp 2.557.562.877.950,00,-
 - 2. Blok B seluas 67,2327 Ha dengan nilai Rp 4.272.252.115.680,00,-
 - 3. Blok C seluas 93,4529 Ha dengan nilai Rp 5.748.188.821.025,00,-
 - 4. Blok D seluas 101,0798 Ha dengan nilai Rp 5.329.658.889.654,40,-
 - 5. Blok E seluas 119,8123 Ha dengan nilai Rp 6.284.426.036.000,00,-:

Informasi Umum Aset Tanah DKI

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas permasalahan pengelolaan Aset Tetap Tanah semester I TA 2014: terdapat 35 bidang tanah Pemprov DKI Jakarta \pm 1.538.972 m² dengan nilai Rp. 7.976.183.446.050 digugat pihak ketiga. 11 tanah diantaranya seluas 67.239 m² dengan nilai Rp. 259.055.991.000 telah digugat pihak ketiga dimana Pemprov DKI Jakarta dinyatakan kalah.

Jumlah tanah yang bersengketa/ bermasalah	Keterangan Dokumen
2 bidang tanah tanah bersertifikat HPL Nomor 11/Kelurahan Jatinegara tanggal 13 Oktober 1991 dan HPL Nomor 2/Kelurahan Penggilingan tanggal 13 Oktober 1997.	Dokumen kepemilikannya telah dimiliki dan dikuasai Pemprov DKI Jakarta.
6 bidang tanah tanah bersertifikat Hak Pakai atas tanah: SLTP 48 Kebayoran Lama, tanah Taman BMW di Kelurahan Papanggo, tanah eks Kelurahan Paseban, tanah lapangan bola di Jalan Danau Tondano Bendungan Hilir, tanah di Jalan Harsono Ragunan, dan tanah di Jalan M.H. Thamrin Nomor 10 Kebon Sirih.	Dokumen kepemilikannya hanya berupa fotokopi sertifikat. Dokumen Sertifikat Hak Pakai asli tidak dikuasai Pemprov DKI Jakarta.
13 bidang tanah dokumen kepemilikannya tidak dimiliki dan dikuasai Pemprov DKI Jakarta.	Dokumen kepemilikan yang tersimpan dalam Gedung Penyimpanan Pulomas hanya berupa Surat Pelepasan Hak (SPH), Girik, fotokopi sertifikat, kuitansi ganti rugi, dan gambar situasi.
14 bidang tanahbidang tanah dokumen kepemilikannya tidak dimiliki dan dikuasai Pemprov DKI Jakarta.	Dokumen kepemilikannya tidak dimiliki dan dikuasai Pemprov DKI Jakarta. Tidak satupun dokumen pendukung kepemilikan tersimpan di Gedung Penyimpanan Pulomas.

Table. Jumlah Tanah yang bersengketa/ bermasalah

Rincian 11 tanah yang gugatan pihak ketiga sampai dengan semester I Tahun 2014 untuk Aset Tanah seluas 67.239m² senilai Rp. 259.055.991.000, sebagaiberikut:

1. Tanah Lapangan Bola Kramat Jati di Jalan Raya Bogor KM 20 RT 007 RW 011 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 7.200m² senilai Rp36.684.000.000 telah **digugat oleh R.**
2. Tanah RSKD Duren Sawit di Jalan Buluh Perindu RT 017 RW 06 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 529m² senilai Rp545.928.000 telah **digugat oleh YSA.**

3. Tanah Dinas Kelautan dan Pertanian di Puri Kembangan Raya RT 005 RW 03 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat seluas 32.470m² senilai Rp121.600.150.000 telah **digugat oleh RS**.

4. Tanah terletak di Jalan Peninggaran Barat I RT 014 RW 011 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 872m² senilai Rp1.371.656.000 telah **digugat oleh MAG**.

5. Tanah Dinas Kelautan dan Pertanian di Jalan Bambu Kuning RT 012 RW 02 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 2.430m² senilai Rp13.668.750.000 telah **digugat oleh SSB (GbM)**.

6. Tanah TPU Cilangkap di Jalan Raya Cilangkap RT 012 RW 05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 8.592m² senilai Rp13.515.216.000 telah **digugat oleh HNbM.**

7. Tanah TPU Pondok Kelapa/Malaka di Kampung Rawadas/Jalan Bina Karya RT 010 RW 05 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 3.203m² senilai Rp5.963.986.000 telah **digugat oleh HDM.**

8. Tanah eks Kantor Kelurahan Paseban di Jalan H. Murtadho RT 012 RW 05 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas 158m² senilai Rp1.402.250.000 telah **digugat oleh HAF selaku Nazir Wakaf HM.**

9. Tanah Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pulogadung (PPUMKMP) eks BPLIP Pulogadung Sertifikat HPL Nomor 2/Penggilingan di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 2.960m² senilai Rp7.423.680.000 telah **digugat oleh R, dkk (Ahli Waris BbK)**.

10. Tanah lapangan bola di Jalan Danau Tondano, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat seluas 6.125m² senilai Rp. 45.661.875.000 telah **digugat oleh I, dkk**.

11. Tanah gudang Satpol PP di Jalan Ciputat Raya, Kampung Tanah Kusir RT 003 RW 03 Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 2.700m² senilai Rp11.218.500.000 telah **digugat oleh R. Siti Sobariyah**.

Berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), hilangnya asset DKI Jakarta disebabkan karena:

1. Kepala BPKD dan Kepala SKPD/UPKD belum tertib dalam melaksanakan kegiatan pengamanan barang daerah.
2. BPKD belum optimal dalam melakukan penatausahaan dokumen kepemilikan Aset Tanah.
3. Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta lemah dan tidak optimal melakukan pengamanan aset terutama dalam proses hukum di pengadilan.

Kesimpulan

- **Bahwa, saat ini ratusan triliun aset tanah DKI, Setneg dan BUMN berpotensi menjadi milik swasta.**
- **Aset tersebut berpotensi hilang dan negara sangat dirugikan.**
- **Selain itu, kerja sama penyewaan aset diduga menjadi permainan antara elit dengan pengusaha yang berdampak pada minimnya pendapatan negara.**
- **Bahwa, Revaluasi pada BUMN perlu diapresiasi, namun belum berdampak pada pendapatan BUMN dan negara.**
- **Bahwa, selain pada BUMN revaluasi juga harus dilakukan pada aset negara.**

Saran

- **Jokowi perlu menyelamatkan aset negara secara nasional, bentuk Badan Penyelamatan Aset Nasional, termasuk kasus BLBI.**
- **Gubernur Basuki perlu menindaklanjuti temuan KPK untuk menyelamatkan aset.**
- **KPK perlu menindaklanjuti dengan pencegahan dan penindakan terhadap pengusaha nakal yang mencuri aset secara 'legal' maupun ilegal.**
- **BPK, BPN dan BUMN perlu bekerjasama menyelamatkan aset ratusan triliun agar tidak dicuri pengusaha gelap.**

Terima kasih atas Perhatiannya
